

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Green Building Kota Probolinggo

Pemerintah kota Probolinggo telah berhasil menjalankan berbagai program CSR dalam rangka mewujudkan dan menata kembali persoalan lingkungan hidup. Dikutip dari makalah yang ditulis oleh wali kota Probolinggo periode 2014-2019, Rukmini Buchori menuliskan pada sebuah paper tentang visinya menjadikan kota Probolinggo sebagai Kota Ramah Lingkungan. Salah satu perencanaannya adalah *green building*.

Rencana strategis kota Probolinggo dalam rangka mewujudkan mimpi menjadi terdepan dalam lingkungan hidup pada ASEAN Community 2025 telah dirancang sejak tahun 2005. Hal itu sebagaimana yang tercantum dalam Green Planning and Design kota Probolinggo dengan Penetapan Perda No. 2 Th. 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2009 - 2028, keberlanjutan secara terus menerus MUSRENBANG dengan pelibatan komunitas lingkungan, menyusun rencana Strategi Terpadu menyikapi Perubahan Iklim, Rencana Aksi Daerah Kota Hijau, Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca,

Kota Probolinggo menjadi salah satu dari lima pemenang Indonesia Green Award (IGRA) 2012 kategori Kota. Kota Probolinggo memiliki skor 85,30, di bawah Kota

Surabaya yang berada di peringkat pertama dan Yogyakarta di peringkat kedua. Keberhasilan pemerintah kota Probolinggo tidak diraih dengan mudah. Dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk mewujudkan impian menjadi kota yang berkelanjutan melalui Kota Hijau. Rumus dasarnya, sebagaimana yang disampaikan oleh wali kota Rukmini adalah kebersamaan gerak dengan legislator, CSR swasta dan keterlibatan masyarakat. Dalam mewujudkan rencana Aksi Kota Hijau ini, pemerintah mempunyai prinsip dasar mengedepankan keterlibatan masyarakat dan pemberdayaan sumber daya lokal. Keterlibatan masyarakat termasuk diantaranya mensinergikan program pemerintah kota dengan program CSR.

Untuk mewujudkan konsep kota hijau tersebut, BPPT dan Pemerintah Kota Probolinggo menjalin Penandatanganan Kesepakatan Bersama dalam "Pengkajian, Penerapan, dan Pemasyarakatan Teknologi untuk Mendukung Pembangunan Daerah Kota Probolinggo" pada tanggal 11 April 2014 di Gedung BPPT, Jakarta. Kerjasama dengan BPPT tersebut bukan berjalan tiba-tiba. Komunikasi dan kesungguhan kota Probolinggo dalam membangun Green City sudah hadir sejak tahun 2008. Pada tahun tersebut Pemkot Probolinggo dan BPPT sudah sering bertukar informasi dalam hal mengoptimalkan pengelolaan lingkungan. Realisasi keberlanjutan tersebut seperti kerjasama BPPT dengan pemerintah Probolinggo pada tahun 2014 yang difokuskan pada pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi pengembangan dan penerapan teknologi pengelolaan limbah cair dan padat, konservasi mangrove, serta pengembangan kota hijau Konsep komunikatif tersebut menjadi cara efektif pemerintah kota Probolinggo dalam melaksanakan berbagai kebijakan terkait lingkungan hidup. Baik itu komunikasi dengan pemerintah pusat, provinsi, masyarakat, swasta, perusahaan

dan seluruh badan/lembaga terkait yang mempunyai visi dan misi sejalan mewujudkan Green City yang ramah lingkungan.

Pemerintah kota probolinggo sendiri mempunyai program PROBOLINGGO MENUJU KOTA YANG RAMAH LINGKUGAN. Dari beberapa program yang diterapkan salah satunya yaitu :



Green Building

- a. Program Eco Office (Kantor Peduli Lingkungan)
- b. Pembentukan Gugus Tugas Hemat Energi untuk perkantoran
- c. Penetapan kebijakan lahan untuk RTH Private adalah 10%, dan RTH Publik 20%
- d. Pemantauan Kualitas Emisi Udara Sumber Tidak Bergerak (Cerobong pabrik)
- e. Sekolah Adiwiyata (sekolah berbudaya lingkungan)
- f. Kampung Industri Ramah Lingkungan

TENTANG ECO OFFICE

Eco Office (Kantor Peduli Lingkungan) merupakan refleksi kebijaksanaan kantor yang menerapkan sistem manajemen lingkungan (SML) dalam upaya menciptakan lingkungan kerja kantor bersih, indah dan nyaman serta menyehatkan (BERIMAN) dan tidak mengganggu lingkungan sekitar.

INDIKATOR ECO OFFICE

- a. Adanya kebijakan dari kepala kantor yang berwawasan lingkungan.
- b. Adanya kegiatan rutin yang mendukung upaya pelestarian lingkungan.
- c. Penggunaan dan pengelolaan sarana dan prasarana kantor yang ramah lingkungan.

MANFAAT ECO OFFICE

- a. Tersusunnya perencanaan dalam pengelolaan lingkungan kantor yang terdokumentasi dan mempunyai target pencapaian setiap tahunnya.
- b. Dimilikinya prosedur pengendalian pencemaran dan penghematan penggunaan air dan listrik.
- c. Setiap staf/karyawan dapat mengetahui dan turut serta melakukan upaya-upaya pengelolaan lingkungan kantor serta upaya-upaya penghematan penggunaan listrik dan air.
- d. Tercapainya upaya penurunan biaya-biaya operasional dan penurunan tingkat pencemaran yang dihasilkan dari aktifitas kerja.
- e. Kondisi fisik lingkungan baik didalam maupun di luar kantor akan lebih baik lagi yaitu lebih bersih, hijau, sehat dan nyaman.

PELAKSANAAN ECO OFFICE

Eco Office di Kota Probolinggo dilaksanakan dengan menyelenggarakan kegiatan Lomba *Eco Office* yang diikuti oleh seluruh SKPD. Beberapa hal yang menjadi titik perhatian dalam penilaian Lomba tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kampanye kegiatan kantor yang peduli lingkungan “Eco Office”
- b. Pembelian dan penggunaan barang
- c. Pengadaan dan penggunaan energi listrik
- d. Pengadaan dan penggunaan air bersih
- e. Penanganan sampah/ limbah
- f. Pemeliharaan gedung dan fasilitas kantor
- g. Penggunaan pekarangan dan ruang terbuka hijau (RTH)
- h. Penggunaan kendaraan kantor dan karyawan
- i. Pemantauan pelaksanaan Eco Office
- j. Evaluasi pelaksanaan Eco Office
- k. Dokumentasi pelaksanaan Eco Office
- l. Keterbukaan informasi

B. Penyajian Data dan Fokus Penelitian

1. Implementasi *Green Building* Sebagai Wujud Bangunan Gedung yang Berkelanjutan di Kota Probolinggo

Green Buiding dapat dipahami sebagai bangunan yang ramah lingkungan berdasarkan perencanaan dan perancangan bangunan yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang akan diterapkan secara nasional. Salah satunya adalah

perencanaan dan perancangan bangunan ramah lingkungan, Program pengembangan ramah lingkungan berkomitmen untuk mewujudkan Probolinggo kota yang ramah lingkungan.

Bangunan hijau (*Green Building*) didesain untuk mereduksi dampak lingkungan terbangun pada kesehatan manusia dan alam, melalui efisiensi dalam penggunaan energi, air dan sumber daya lain, perlindungan kesehatan penghuninya dan meningkatkan produktifitas pekerja, mereduksi limbah/buangan padat, cair dan gas, mengurangi polusi/pencemaran padat, cair dan gas serta mereduksi kerusakan lingkungan.

Secara umum, tingkat keeratan hubungan penerapan *Green Building* dengan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) adalah termasuk kuat. Karena jika penerapan IMB dilaksanakan dengan tepat dan benar maka bangunan yang akan dibangun sesuai dengan standar dan dapat meminimalisir adanya dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan alam.

a. Komunikasi

Keberhasilan penerapan kebijakan mensyaratkan agar implementor tahu tentang apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi penerapan. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak, beliau Ari Puspita, ST., MAP selaku kepala bidang prasarana dan pengembangan wilayah mengatakan bahwa :

“.....Salah satu visi kota Problinggo adalah pembangunan yang berkelanjutan jadi salah satu implementasinya dengan green bilding itu sendiri pemerintah kota probolinggo sendiri sudah menerapkan green building atau bangunan yang ramah lingkungan. Pemerintah kota Probolinggo juga sudah menerapkan peraturan UU no 8 tahun 2002 tentang bangunan gedung dan pemerintah kota probolinggo juga sudah menerapkan PERDA no 4 tahun 2008 tentang bangunan gedung itu sendiri. Dalam menerapkan *Green Building* juga harus aspek – aspek seperti penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya.

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Rahman Kurniadi, ST, MT selaku Kasi Bangunan Gedung dan jasa Kontruksi Bidang Cipta Karya Dinas PUPR mengatakan bahwa :

“.....Pemerintah kota Probolinggo sendiri masih belum benar – benar mengimplementasikan *Green Building*. *Green Building* sendiri mempunyai syarat – syarat yang sudah ditetapkan seperti jarak antara gedung dan lahan kosongnya tidak bisa terlalu mepet, harus mengurangi lampu, dan kecahayaan harus maksimal karena kondisi yang ada disekarang kita masih menggunakan lampu dan juga tanaman – tanaman sendri yang ada di dalam ruangan juga minimal kita mengharapkan green building tapi tidak maksimal karena banyak syarat yang harus dipenuhi. Tetapi *Green Building* di Kota Probolinggo dikatakan ada ya memang ada tapi asal ada, tetapi tidak mungkin maksimal. Jadi menurut saya itu belum bisa dikatakan green building.

b. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak

akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ari Puspita, ST., MAP beliau mengatakan bahwa :

“.....Pemerintah Kota probolinggo sudah mengeluarkan kebijakan terkait green building dan menghimbau kepada kantor – kantor pemerintahan dan bangunan gedung lainnya untuk menerapkan bangunan yang ramah lingkungan yang bertujuan untuk penghematan listrik, air dan energy. Bahkan himbauan ini sudah ada dari tahun 2013 yaitu Menuju Probolinggo Kota yang Ramah Lingkungan.

Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksana kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan atau program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Rahman Kurniadi, ST, MT selaku Kasi Bangunan Gedung dan jasa Kontruksi Bidang Cipta Karya Dinas PUPR mengatakan bahwa :

“.....Kami menghimbau untuk menerapkan *Green Building* sebagai pembangunan berkelanjutan ini harus benar – benar memperhatikan syarat – syarat dan aspek – aspek yang sudah ada untuk menerapkan bangunan yang ramah lingkungan agar supaya bangunan tersebut bisa dikatakan bangunan yang ramah lingkungan.

c. Disposisi atau Sikap

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Berbagai pengalaman pembangunan dinegara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul dinegara-negara dunia ketiga, seperti indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ari Puspita, ST., MAP beliau mengatakan bahwa :

“.....Pemerintah probolinggo sudah menerapkan Program *Eco Office*. *Eco Office* sendiri adalah Kantor Peduli Lingkungan yang berfungsi untuk mengadakan suatu lomba terhadap bangunan yang menerapkan *Green Building* dan nantinya akan diberi penilaian terhadap kantor pemerintahan dan bangunan gedung lainnya. Program ini awalnya hanya diperuntukkan kantor dinas saja. Tetapi sekarang kantor swasta juga didorong untuk menerapkan *Green Building* meskipun tidak maksimal tetapi sudah ada arah kesana.



Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan

program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Rahman Kurniadi, ST, MT mengatakan bahwa :

“.....Untuk kegiatan pembangunan rumah sakit yang baru ini kita berencana akan benar – benar menerapkan *Green building* tersebut dengan melelang secara nasional jadi kita memerlukan konsultan dari luar karena untuk merancang *green building* sendiri harus mempunyai Sertifikat Keahlian (SKA). Karena untuk saat ini local Kota Probolinggo belum ada yang mempunyai SKA tersebut. Karena persyaratan *Green Building* banyak seperti penghematan lampu dan pencahayaan harus maksimal, kondisi yang ada sekarang kita masih menggunakan lampu karena pencahayaan kita masih minim.



d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ari Puspita, ST., MAP mengatakan bahwa :

“.....Untuk saat ini Pemerintah Kota Probolinggo belum bisa memaksimalkan implementasi *Green Building* sebagai wujud pembangunan berkelanjutan secara sepenuhnya padahal pemerintah kota sendiri sudah berupaya melakukan himbauan dan mengeluarkan kebijakan bahkan sudah menerapkan program *Exo Office* tetapi masih saja belum bisa maksimal. Mungkin karena kurangnya dukungan dan kurangnya kepedulian dari pihak – pihak terkait.

Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dikakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Rahman Kurniadi, ST, MT mengatakan bahwa :

“.....Penerapan *Green Building* di Kota Probolinggo saat ini masih jauh dari kata maksimal karena Pemerintah Kota Probolinggo tidak benar – benar memperhatikan aspek – aspek *Green Building* secara maksimal. Pemerintah Kota Probolinggo sekarang ini dalam menerapkan hanya asal ada saja, tetapi tidak memperhatikan syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam implementasi *Green Building*.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung

a. Faktor Penghambat

Dalam sebuah kebijakan pasti memiliki faktor penghambat dimana faktor ini menyangkut dengan hal-hal yang berpengaruh atau bahkan menghentikan sesuatu menjadi lebih dari sebelumnya.

Ari Puspita, ST., MAP selaku kepala bidang prasarana dan pengembangan wilayah mengatakan bahwa :

“.....Faktor Penghambat dalam implentasi *Green Building* di Kota Probolinggo pertama adalah masalah anggaran. Anggaran sendiri memang cukup mempengaruhi juga dalam proses implementasi *Green Building* sebagai wujud pembangunan yang berkelanjutan karena jika tidak didukung dengan anggaran maka proses penerapannya tidak maksimal. Kedua adalah masalah perilaku – perilaku dari pihak tertentu juga menghambat dalam proses implementasi tersebut.

Dari sumber daya manusianya sendiri lah yang mengakibatkan faktor penghambat paling utama dalam sebuah kebijakan. Dimana ketika seorang yang tergolong orang yang penting dalam proses implementasi *Green Building*. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Rahman Kurniadi, ST, MT selaku Kasi Bangunan Gedung dan jasa Kontruksi Bidang Cipta Karya Dinas PUPR mengatakan bahwa :

“.....Yang menjadi penghambat dalam proses penerapan *Green Building* adalah ketidakmampuan konsultan yang ada di Kota Probolinggo tidak memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) terkait dengan *Green Building*. Kemudian lokasi bangunan di Kota Probolinggo antara bangunan dengan lahan kosong yang terlalu mepet ini juga yang menjadi hambatan dalam menerapkan *Green Building*.

b. Faktor Pendukung

Dalam sebuah kebijakan memang memiliki sebuah faktor pendukung dan faktor penghambat. Dimana faktor penghambat berbeda dengan faktor pendukung merupakan

hal-hal yang mempengaruhi sesuatu menjadi berkembang, memajukan, menambah dan menjadi lebih dari sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ari Puspita, ST., MAP selaku kepala bidang prasarana dan pengembangan wilayah mengatakan bahwa :

“.....Pemerintah Kota Probolinggo sendiri akan terus berproses dalam melaksanakan penerapan *Green Building* dan komitmen dari pemerintah Kota Probolinggo. Dengan adanya program Exo Office ini juga diharapkan bisa mendorong kebijakan *Green Building* tersebut. Tetapi juga harus didukung dengan anggaran yang memadai agar nantinya penerapan Green Building sendiri terlaksana dengan maksimal.

Faktor merupakan keadaan, hal atau peristiwa yang ikut mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya sesuatu. Dalam hal ini faktor pendorong dalam suatu kebijakan itu sendiri adalah sumber daya manusia, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Rahman Kurniadi, ST, MT selaku Kasi Bangunan Gedung dan jasa Kontruksi Bidang Cipta Karya Dinas PUPR mengatakan bahwa :

“.....Pemerintah Probolinggo setidaknya juga harus memperhatikan akan pentingnya penerapan *Green Building* tersebut karena dengan menerapkan secara maksimal akan menghemat sumber daya seperti penghematan listrik, air, dan sebagainya. Dengan melakukan pelelangan juga dapat menerapkan Green Building secara maksimal karena di Kota Probolinggo konsultan sendiri belum mampu melaksanakan penerapan tersebut karena terkendala Sertifikat Keahlian (SKA) dan yang terjadi Pemerintah Kota Probolinggo harus mendatangkan dari luar kota untuk bisa menerapkan secara optimal.

C. Analisis dan Interpretasi Data

Implementasi Green Building Sebagai Wujud Bangunan Gedung yang Berkelanjutan di Kota Probolinggo

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan.. Menurut Syauckani dkk (2004 : 295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam

rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, *Pertama* persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. *Kedua*, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. *Ketiga*, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (2005 : 65) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implemetasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Syukur dalam Surmayadi (2005 : 79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan (2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan (3) unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Ada beberapa pendekatan implementasi kebijakan pemerintah, salah satunya adalah pendekatan menurut Edwards III implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi yaitu sebagai berikut

a. Komunikasi

Menurut Agustini (2006 : 157); “Komunikasi adalah salah satu variabel penting yang mempengaruhi penerapan kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari penerapan kebijakan publik”. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik.

Dalam mengelola komunikasi yang baik perlu dibangun dan dikembangkan saluran-saluran komunikasi yang efektif. Semakin baik pengembangan saluran-saluran komunikasi yang dibangun, maka semakin tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi dari peneliti bahwasanya pemerintah Kota Probolinggo sudah menerapkan *Green Building* meskipun belum maksimal tetapi sudah ada arah kesana. Salah satu visi kota Probolinggo adalah pembangunan yang berkelanjutan jadi salah satu implementasinya dengan *green building* itu sendiri pemerintah kota Probolinggo sendiri sudah menerapkan green building atau bangunan yang ramah lingkungan. Pemerintah kota Probolinggo juga sudah menerapkan peraturan UU no 8 tahun 2002 tentang bangunan gedung dan pemerintah kota Probolinggo juga sudah menerapkan PERDA no 4 tahun 2008 tentang bangunan gedung itu sendiri.

Dalam menerapkan *Green Building* juga harus aspek – aspek seperti penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya

. Bapak Rahman juga mengatakan bahwa Pemerintah kota Probolinggo sendiri masih belum benar – benar mengimplementasikan *Green Building*. *Green Building* sendiri mempunyai syarat – syarat yang sudah ditetapkan seperti jarak antara gedung dan lahan kosongnya tidak bisa terlalu mepet, harus mengurangi lampu, dan kecahayaan harus maksimal karena kondisi yang ada disekarang kita masih menggunakan lampu dan juga tanaman – tanaman sendiri yang ada di dalam ruangan juga minimal kita mengharapkan green building tapi tidak maksimal karena banyak syarat yang harus dipenuhi. Tetapi *Green Building* di Kota Probolinggo dikatakan ada ya memang ada tapi asal ada, tetapi tidak mungkin maksimal. Jadi menurut saya itu belum bisa dikatakan green building.

b. Sumber Daya

Pendapat Edward III dalam Agustino (2006 : 158-159), sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari :

Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (street-level bureaucrats). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan impementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan impelementsai kebijakan, tetapi diperlukan

sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.

Informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu : pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

Wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi bahwasanya pemerintah Kota Probolinggo sendiri pada dasarnya sudah mengeluarkan kebijakan terkait *green building* dan menghimbau kepada kantor – kantor pemerintahan dan bangunan gedung lainnya untuk menerapkan bangunan yang ramah lingkungan yang bertujuan untuk penghematan listrik, air dan energy. Bahkan himbauan ini sudah ada dari tahun 2013 yaitu ”Menuju Probolinggo Kota yang Ramah Lingkungan”.

Pemerintah Kota Probolinggo juga menghimbau untuk menerapkan *Green Building* sebagai pembangunan berkelanjutan ini harus benar – benar memperhatikan syarat – syarat dan aspek – aspek yang sudah ada untuk menerapkan bangunan yang ramah lingkungan agar supaya bangunan tersebut bisa dikatakan bangunan yang ramah lingkungan.



c. Disposisi atau Sikap

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2006 : 159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari :

Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

Insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

Pemerintah probolinggo sudah menerapkan Program Eco Office. Eco Office sendiri adalah Kantor Peduli Lingkungan yang berfungsi untuk mengadakan suatu lomba terhadap bangunan yang menerapkan Green Building dan nantinya akan diberi penilaian terhadap kantor pemerintahan dan bangunan gedung lainnya. Program ini awalnya hanya diperuntukkan kantor dinas saja. Tetapi sekarang kantor swasta juga didorong untuk menerapkan Green Building meskipun tidak maksimal tetapi sudah ada arah kesana.

Untuk kegiatan pembangunan rumah sakit yang baru ini kita berencana akan benar – benar menerapkan Green building tersebut dengan melelang secara nasional jadi kita memerlukan konsultan dari luar karena untuk merancang green building sendiri harus mempunyai Sertifikat Keahlian (SKA). Karena untuk saat ini local Kota Probolinggo belum ada yang mempunyai SKA tersebut. Karena persyaratan Green Building banyak seperti penghematan lampu dan pencahayaan harus maksimal, kondisi yang ada sekarang kita masih menggunakan lampu karena pencahayaan kita masih minim.

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005 : 149-160) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu :

Pertama, birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (*Public Affair*). Kedua, birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya. Ketiga, birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda. Keempat, fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas. Kelima, birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati. Keenam, birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

Berdasarkan wawancara dan hasil observasi Pemerintah Kota Probolinggo belum bisa memaksimalkan implementasi *Green Building* sebagai wujud pembangunan berkelanjutan secara sepenuhnya padahal pemerintah kota sendiri sudah berupaya melakukan himbauan dan mengeluarkan kebijakan bahkan sudah menerapkan program *Exo Office* tetapi masih saja belum bisa maksimal. Mungkin karena kurangnya dukungan dan kurangnya kepedulian dari pihak – pihak terkait.

Green Building di Kota Probolinggo saat ini masih jauh dari kata maksimal karena Pemerintah Kota Probolinggo tidak benar – benar memperhatikan aspek – aspek *Green Building* secara maksimal. Pemerintah Kota Probolinggo sekarang ini dalam menerapkan *Green Building* hanya asal ada saja, tetapi tidak memperhatikan syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam implementasi *Green Building*.

- 1. Implementasi Green Building Sebagai Wujud Bangunan Gedung yang Berkelanjutan di Kota Probolinggo**
 - a. Faktor Penghambat

Dalam sebuah kebijakan pasti memiliki faktor penghambat dimana faktor ini menyangkut dengan hal-hal yang berpengaruh atau bahkan menghentikan sesuatu menjadi lebih dari sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari peneliti bahwasannya faktor penghambat yang dialami dilapangan selama ini adalah anggaran sendiri memang cukup mempengaruhi juga dalam proses implementasi *Green Building* sebagai wujud pembangunan yang berkelanjutan karena jika tidak didukung dengan anggaran maka proses penerapannya tidak maksimal. Kedua adalah masalah perilaku – perilaku dari pihak tertentu juga menghambat dalam proses implementasi tersebut.

Ketidakmampuan konsultan yang ada di Kota Probolinggo tidak memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) terkait dengan *Green Building*. Kemudian lokasi bangunan di Kota Probolinggo antara bangunan dengan lahan kosong yang terlalu mepet ini juga yang menjadi hambatan dalam menerapkan *Green Building*.

b. Faktor Pendukung

Dalam sebuah kebijakan memang memiliki sebuah faktor pendukung dan faktor penghambat. Dimana faktor penghambat berbeda dengan faktor pendukung merupakan hal-hal yang mempengaruhi sesuatu menjadi berkembang, memajukan, menambah dan menjadi lebih dari sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari peneliti bahwasanya Kota Probolinggo yang menjadi faktor pendukung adalah dengan adanya program *Eco Office* ini juga diharapkan bisa mendorong kebijakan *Green Building* tersebut. Tetapi juga

harus didukung dengan anggaran yang memadai agar nantinya penerapan *Green Building* sendiri terlaksana dengan maksimal.

Dengan melakukan pelelangan juga dapat menerapkan Green Building secara maksimal karena di Kota Probolinggo konsultan sendiri belum mampu melaksanakan penerapan tersebut karena terkendala Sertifikat Keahlian (SKA) dan yang terjadi Pemerintah Kota Probolinggo harus mendatangkan dari luar kota untuk bisa menerapkan secara optimal.